

RASIONALITI PRILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI RIAU¹

Syafhendry²

A. Pendahuluan

Mengapa perilaku pemilih? Kerana perilaku pemilih senantiasanya menarik untuk diteliti, ketertarikan tersebut disebabkan perilaku pemilih selalu mengubah undiannya politiknya dari pemilu ke pemilu lainnya, dari pemilu legislatif ke pemilu kepala daerah dan berubah. Perilaku yang berubah tersebut bisa sahaja dulu mengundi sekarang tidak, dulu perilaku konsisten sekarang tidak, dulu perilaku masa bodoh sahaja sekarang ikut berpartisipasi.

Perilaku pemilih seperti ini tentu mempengaruhi perolehan suara dan kekuatan partai politik. Apalagi kasus di Indonesia dengan terjadinya perubahan paradigma dalam sistem pemilihan kepala daerah. Perubahan itu terjadi sejak jatuhnya pemerintahan orde baru [1966-1988] dan diganti dengan pemerintahan masa reformasi yang banyak memberikan pencerahan terhadap kondisi politik. Salah satu nilai perubahan tersebut dalam dibidang politik adalah masalah sistem pemilihan langsung baik untuk anggota legislatif, presiden dan kepala Daerah. Jika pada masa pemerintahan orde baru dikenal dengan sistem pemilihan perwakilan, maka pada masa pemerintahan reformasi dikenal dengan sistem pemilihan langsung.

Perubahan paradigma ini, tentu memberi peluang terhadap partisipasi politik masyarakat. Jika pada masa pemerintahan orde baru masyarakat

¹ Disampaikan pada seminar Internasional pembangunan kawasan ekonomi, hokum dan pemerintahan. Tanggal 7 s/d 8 Juni 2010 di Pekanbaru.

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

pemilih bergantung pada keputusan partai politik, maka masa pemerintahan reformasi ini masyarakat pemilih dalam menentukan keputusan politiknya dapat dilakukan dengan sendiri secara langsung. Inilah kebebasan demokrasi yang dirasakan masyarakat pemilih Indonesia saat ini.

Hal ini sejalan dengan esensi dari demokrasi itu sendiri yakni kekuasaan berada ditangan rakyat, tetapi bagaimana demokrasi itu diimplikasikan dalam kehidupan berpolitik sehari-hari boleh sangat berbeda, tergantung dari seberapa besar Kategori rakyat didalamnya. Dalam kontek pemilih merupakan satu institusi yang menentukan masa depan mereka dan Negara dengan memilih calon-calon yang akan memerintah dan memimpin Negara/daerah.

Keadaan ini menyatakan bahwa pemilu itu merupakan satu proses yang komplek kerana melibatkan keputusan individu dan kumpulan yang mampu memberi kesan sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada sistem politik Negara. Salah satu nilai dari sistem politik tersebut adalah pergantian pemimpin secara teratur [orderly succession of the rulers]³. Nilai-nilai tersebut tampaknya berlaku juga pada jabatan kepala daerah sebagai pemipinan pemerintahan di daerah. Kerana dalam masa lima tahun waktu masa kepala daerah berakhir pada prinsipnya akan dilakukan pergantian. Pergantian kepemimpinan tersebut di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan paradigma dari sistem *demokrasi perwakilan* kepada *demokrasi langsung*.

Pengamalan demokrasi langsung [direct democracy]⁴ telah menjadi sebat di Indonesia sejak masa reformasi 1988. Disini terjadi perubahan

³ Henri B. Mayo, *Introduction to Democratic Theory*, dalam Djohaermansyah Djohan, *Problematis Pemerintahan dan Politik local*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 96.

⁴ Demokrasi langsung [*direct democracy*] adalah sistem pemerintahan yang diterapkan setelah reformasi yang terjadi di beberapa city-states [Negara Kota] di Yunani sekitar pertengahan abad kelima sebelum masehi, Sistem pemerintahan yang dikota-kota tersebut sebelumnya bersifat aristokrasi, oligarki, monarki, atau tirani, berubah menjadi suatu sistem yang melibatkan secara langsung sejumlah besar warga dalam pembuatan hukum, penentuan kebijakan penting, termasuk memilih orang yang akan memerintah sebagai

paradigma pada sistem pemilu. Dari sistem pemilihan tidak langsung (sistem Perwakilan)⁵ kepada sistem pemilihan langsung.

Rasionaliti menjadi penting dewasa ini, kerana dari sikap pemilih pilkada di berbagai tempat memperlihatkan bahawa pemilih telah mendidik kita untuk tidak cepat underestimate. Anggapan bahawa pemilih umumnya bodoh, paternalistik, mudah dimobilisasi, dan dirayu itu semua banyak yang keliru.

Penyelidikan tentang perilaku pemilih dalam pemilu di Indonesia khasnya provinsi Riau belum banyak dilakukan, walaupun penyelidikan politik sudah banyak, namun lebih kepada penyelidikan deskriptif dan institusional dan belum lagi mengkaji tentang tingkahlaku politik mengundi masyarakat secara umum.

Di Provinsi Riau pemilihan kepala daerah langsung sudah berlangsung di beberapa daerah Kabupaten/Kota. Riau sebagai sebuah daerah Provinsi mempunyai 9 daerah Kabupaten dan 2 Kota. Semua Kabupaten/Kota telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung adalah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singgingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Sedangkan untuk Kota ialah Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

Pemilih masyarakat Provinsi Riau pada saat pemilu legislatif yang lebih ramai kepada partai pemerintah masa orde baru yakni partai Golongan Karya [Golkar] berbanding partai lainnya. Tetapi pada saat pemilu kepala daerah [Pilkada] pemilih bersebelahan politik dengan partai golkar. Orientasi pemilih tertuju pada kandidat calon pemimpin dibandingkan partai yang mencalonkan.

pemimpin mereka, lihat Hetifah Sj Sumarto, *Demokrasi Partaisipatif dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, dalam Jurnal analisis social, Vol.9 No.3, Desember 2004, Bandung, hlm. 1-2

⁵ Inggris adalah Negara pertama yang menciptakan suatu parlemen "work able" yaitu sebuah dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat, menggantikan "civil war dengan civil vote, lihat Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, Bina aksara, Jakarta, 1988, hlm. 42

Proses ketidak selarian perilaku pemilih masyarakat Provinsi Riau ini, sangatlah menarik untuk dikaji, mengingat hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau pada pemilu legislatif partai Golkar selalu memperoleh suara terbanyak, tetapi pada saat pemilihan kepala daerah perolehan suara partai Golkar justru berkurang dibandingkan dengan suara pemilu legislatif.

Pola-pola pemilih dalam pemilihan kepala daerah di provinsi Riau akan menemukan kecendrungan terbentuknya sebuah pola umum mengundi masyarakat yang tidak rasional. Sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1 : PERGESERAN SUARA PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DENGAN PIMILIHAN DAERAH [PILKADA] DI PROVINSI RIAU

Nama Pasangan Calon yang Maju dalam Pilkada	Kabupaten/ Kota	Partai Pendukung	Perolehan Suara Partai pada Pemilu Legislatif	Gabungan Jumlah suara Dukungan	Perolehan suara dalam Pilkada
Drs.H.R.Thamsir Rachman Drs. H. Mujtahid Thalib	Kabupaten Indragiri Hulu	Partai Persatuan Pembangunan Partai Bintang Reformasi Partai Persatuan Daerah	7.011 [3.16%] 3.605 [1.62%] 3.268 [1.47%]	13.884 6.25 %	65.125 52,64 % Pemenang
Drs. Emrizal Pakis Drs. H. Hasyim Rauf		Partai Bulan Bintang Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan&Parsatuan Indonesia Partai Demokrat Partai Amanat Nasional	3.020 [1,36%] 3.579 [1.61%] 3.496 [1.57%] 21.594 [9.74%] 4.365 [1.97%]	36.054 16.25 %	56.597 47,36 % Gagal
Drs.H. Wan Syamsir Yus Drs.H. Mustar Effendi	Kota Dumai	Partai Bintang Reformasi Partai Persatuan Pembangunan Partai Buruh	2.161 [1.28%] 8.591 [5.11%] 2.674 [1.59%]	13.426 7.98 %	31.128 32,09 % Gagal
Drs.H. Khairul Anwar Drs.H. Zulkifli Ahad		Partai Golkar	15.032 [8.95%]	15.032 8.95 %	13.858 14,08 % Gagal
Drs. Zulkifli AS dr.H. Sunaryo		Partai Keadilan Sejahtera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai serikat Indonesia Partai Bulan Bintang Partai Merdeka Partai Damai Sejahtera Partai Amanat Nsional	8.412 [5.01%] 7.432 [4.42%] 731 [4.3%] 3.008 [1.79%] 1.057 [0.62%] 4.338 [2.58%] 7.363 [4.38%]	762.61 23.1 %	52.211 53,83% Pemenang
Drs. H. Syamsuar, M.Si Drs.H. Endang Sukarelawan	Kabupaten Siak	Partai Golkar Partai Keadilan Sejahtera Paartai Penegak Demokrasi Indonesia Partai Bulan Bintang	21.245 [9.77%] 11.772 [5.41%] - [0%] 4.152 [1.90%]	37.169 17.08 %	39.504 29,54 % Gagal
H. Arwin AS, SH Drs. OK Fauzi Jamil		Partai Amanat Nasional PDI Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan Partai Damai Sejahtera Partai Buruh	9.899 [4.55%] 14.173 [6.52%] 6.475 [2.98%] 7.870 [3.62%] 1.764 [0.81%]	40.181 18.48 %	88.465 66,15 % Pemenang
H. Agus Salim, SH H. Tengku Harun, SH		Partai Bintang Reformasi Partai Karya Peduli Bangsa Partai Pelopor Partai Serikat Indonesia PNI Marhaenisme Partai Merdeka Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	1.858 [0.85%] 1.469 [0.67%] 416 [1.9%] 45 [2%] 404 [1.8%] 225 [1.0%] 0 [0%]	4.417 8.22 %	5.769 4,31 % Gagal

Sumber : komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Riau 2009

Fenomena pergeseran suara pemilih pada Tabel I. 1 diatas, menunjukan bahawa pemilih pada prinsipnya tidak konsisten terhadap partai yang diundi pada masa pemilu legislatif berbanding pemilu pemilihan Kepala Daerah. Kondisi tidak konsistennya pemilih ini menyebabkan pemilih pada pemilihan Kepala Daerah menjadi tidak rasional, kerana lebih mengedepankan faktor individu ketimpang partai.

B. Persoalan Kajian

1. Apakah keputusan politik yang ditetapkan pemilih atas undian rasional berdasarkan pendekatan visi, misi, dan program kerja dari calon kepala daerah.
2. Apakah keputusan politik yang diambil pemilih dalam menetapkan undiannya lebih bersifat irasional, dengan pendekatan kesamaan sifat, kesamaan karakter tokoh, dan kedekatan tanpa melihat atribut partai.
3. Mengapa pemilih selalu merubah-ubah pilihan politiknya dalam pemilu.

C. Objektif Kajian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pergantian kepemimpinan telah mengalami perubahan paradigma dari sistem demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung, dan sebagai perwujudan pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen Kepala daerah sehingga keputusan politik yang akan diambil akan bermakna untuk kemajuan daerah. Maka dari itu secara umum kajian ini akan meninjau perilaku pemilih dalam menentukan calon Kepala Daerah.

Secara khususnya kajian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis perilaku pemilih di Indonesia pada pemilihan rasional dan tidak rasional dalam memilih kepala daerah di propinsi Riau
2. Untuk mengenal pasti sejarah dan parameter perilaku pemilih di Indonesia

3. Untuk menganalisis tanggapan dan kesadaran rakyat terhadap visi, misi, program, kesamaan sifat, karakter tokoh dan kedekatan hubungan.
4. Untuk mengenal pasti sifat manakah yang lebih dominan diantara rasional dengan irasional bagi pemilih di dalam membuat keputusan politiknya.

D. Pendekatan Teori

Studi-studi tentang perilaku pemilih pada dasarnya masih merupakan persoalan baru dalam konteks politik di Indonesia. Di Amerika Serikat sendiri, kajian tentang perilaku pemilih dalam bidang ilmu politik baru muncul tahun 1937 yang ditandai dengan terbitnya buku *“Political Behavior: Studies in Election Statistics”* karya Herbert Tingsten. Sebab, sebelumnya banyak ilmuwan politik di Amerika yang memfokuskan dan lebih puas dengan metode penelitian ilmu politik tradisional, seperti analisis tekstual filsafat politik, proses pembuatan kebijakan legislatif, deskripsi-deskripsi tentang lembaga-lembaga politik, dan semacamnya. Oleh kerananya, dalam konteks ini, munculnya penelitian-penelitian tentang perilaku pemilih dalam kajian ilmu politik merupakan reaksi atau pemberontakan atas ketidakpuasan terhadap penelitian-penelitian tradisional tersebut.

Literatur tentang pengambilan keputusan terfokus pada perdebatan apakah kandidat atau pemilih dalam pengambil keputusannya rasional atau tidak rasional. Padahal, kata ‘rasional’ sendiri adalah kata yang sangat sulit dipahami. Seperti diungkapkan Popper⁶ tentang rasionalitas *‘I have a deep ingrained fear of big wordes, such as rationality.’* Weber⁷ membedakan *rasionalitas nilai (value-rational)* dengan *rasionalitas tujuan (goal-rational)*.

⁶ Popper, K.R., *“Bernay’s plea for a wider notion of rationality,”* in Schilpp, P>A [ed.], *The Philosophy of Karl Popper*, open Court : La Salle. 1974

⁷ Weber, M., *Economy and society : an outline of interpretative sociology*, Edited by Roth, G., & Mittich, C. Berkely : Univercity of California Press, 1978

Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan, atau asal-usul. Rasionalitas seseorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai dia pegang, dan bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitas tujuan, di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

*Don Bryne*⁸ mengemukakan teori afek respon [*respon affect theori*] tentang perilaku voting. Byrne mengemukakan bahwa ada dua asumsi tentang manusia, yaitu *manusia sebagai makhluk yang rasional dan yang tidak rasional*. Dalam perilaku voting, pemilih dikatakan **rasional** jika ia memberikan suara atau undian suatu partai atau calon kepala daerah didasarkan pada *komponen belief*, yaitu *atribut yang melekat pada suatu partai atau calon Kepala Daerah; apa visi dan misi partai atau Calon Kepala Daerah ke depan; apa programnya [political program], dan apa [platformnya]*.

Rasionaliti merupakan suatu sikap dan tindakan yang mempertimbangkan segala sesuatu secara rasional dan logic. Dalam konteks perilaku politik, maka rasionaliti politik termasuk pula rasionaliti perilaku pemilih. Berdasarkan rasionaliti itu, individu melakukan sesuatu tindakan politik berdasarkan faedah yang boleh ia dapat daripada apa-apa yang ia lakukan tersebut. Dengan andaian atau asumsi bahawa pertimbangan-pertimbangan yang logic dan rasional ialah salah satu ciri-ciri masyarakat modern serta individu yang berpendidikan tinggi.

Sebaliknya seorang pemilih dikatakan **tidak rasional** atau emosional apabila ia mengundi suatu partai atau calon Kepala Daerah hanya didasarkan pada *kesamaan [similarity] sifat, karakteristik tokoh dan juga*

⁸ Lihat, Ancok, J. *Psikologi Politik*. Hand Out, [tidak diterbitkan], Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM

kedekatan [proximity] tanpa melihat terlebih dahulu segala atribut partai atau calon tersebut. Seseorang dikatakan irasional jika ia mengundi partai kerana pimpinan partai atau calon pemimpin tersebut adalah orang berasal dari daerah yang sama dengannya, atau kerana ia adalah orang yang pernah menolongnya sebelumnya, tanpa ada pertimbangan atribut partai atau calon pemimpin.

Sementara itu, Evans dan Over⁹ membedakan dua konsep rasionalitas. *Pertama*, rasionalitas diartikan sebagai berpikir, dan beraksi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (R1). Rasionalitas jenis ini lebih mengendepankan alasan-alasan pribadi guna mencapai tujuan personal. *Kedua*, rasionalitas diartikan sebagai berpikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan, dan beraksi berdasarkan sebuah system normatif tertentu (R2). Rasionalitas jenis ini lebih menekankan pada seberapa besar derajat kesamaan (konformitas) antara keputusan individu dengan 'best-practice' yang terdapat dan diyakini kebenarannya dalam masyarakat.

Semakin sesuai keputusan individu dengan standar sosial, dia semakin dianggap rasional pula. Begitujuga sebaliknya, semakin tidak sesuai antara apa yang ingin dicapai dan diwujudkan dengan tujuan masyarakat pada umumnya, individu tersebut semakin dianggap tidak rasional. Kedua makna rasionalitas ini tak berhubungan satu dengan yang lain. Seseorang boleh sangat rasional dalam usaha mencapai tujuannya (rasionalitas pertama), namun boleh jadi berlawanan dengan standar umum yang ada dalam masyarakat (perilaku penyimpangan social). Dengan menganut sistem perbedaan ini, individu boleh mencapai tujuannya sendiri terlepas dari perdebatan apakah tujuannya rasional atau tidak. Soalnya, masing-masing orang akan mendefinisikan tujuan yang hendak dicapainya dengan cara berlainan.

⁹ Evans, J.St.B.T., & Over, D.E. "Rationality in reasoning, Hove, Sussex: Psychology Press.,1996.

Defenisi rasionalitas serupa juga diungkapkan oleh Chater¹⁰. Mereka membedakan *rasionalitas kalkulasi* dan *rasionalitas deskripsi*. Rasionalitas kalkulasi didefenisikan sebagai proses berpikir yang menggunakan teknik/metode probabilistik, logika dan proses pengambilan keputusan. Sementara rasionalitas deskripsi diartikan sebagai derajat keputusan atau perilaku dibandingkan dengan sebuah standar hasil yang ditelorkan rasionalitas kalkulasi. Gigerenzer dan Goldstein¹¹ mempercayai pandangan klasik rasionalitas (bahawa aturan 'rasional' adalah standar yang harus digunakan dalam proses pengambilan keputusan) harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan.

Banyak kalangan yang berpendapat bahawa metode probabilistic, statistik, *game theory*, dan kalkulasi adalah metode yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Lindenberg¹², konsep rasionalitas berangkat dari konsep individu yang memiliki preferensi dan dihadapkan pada kendala (*constraints*) ketika harus mengambil keputusan. Biasanya, premis dasarnya adalah bahawa individu memiliki sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan keuntungan dan sekaligus menekan biaya (*cost*), dia dianggap semakin rasional. Sebaliknya, *ketika pemilih tidak menggunakan rumus dan perhitungan untung-rugi dalam proses pengambilan keputusannya, oleh perspektif ini dia dicap sebagai makhluk yang sembrono dan tidak rasional*.

Rasionalitas klasik yang berlandaskan pada hitung-hitungan untung rugi dan maksimalisasi (*economic perspective*) serta teknik ilmiah dalam sistem pengambilan keputusan ini telah menuai banyak kritikan. Para sosiolog berpendapat bahawa para actor mengambil keputusan dan

¹⁰ Chater, N., Oaksford, M., Naksia, R., & Redington, M., "Fast, frugal, and rational : how raional norms explain behavior," *Organisational Behavior and Human Decision Process*, (90),1, 2003, hlm.63-68

¹¹ Gigerenzer, G., & Goldstein, D., *Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality*, "Psychological Review", (103), 1996, hlm. 650-669

¹² Lindenberg, S., "An assessment off the new political economy : its potential for the social sciences and sciology in partaicular," *Sociological Theory*, (3), 1985, hlm.229-239

beraksi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan (*beliefs*) yang mereka pegang serta bukannya berdasarkan kalkulasi untung-rugi¹³.

E. Metode Kajian

E. 1. Populasi dan Sampel Kajian.

Bagi tujuan kajian ini, maka populasi kajian ini berdasarkan kepada jumlah pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap [DPT] pada masing-masing daerah sample yakni kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan Kota Dumai. Lalu masing-masing Kabupaten/Kota yang menjadi daerah sampel ini ditetapkan 3 (tiga) Kecamatan. Dari tingkat Kecamatan ini ditetapkan lagi untuk tingkat Desa/Kelurahan, masing-masing kecamatan diambil 3 desa/kelurahan. Dari tingkat desa/kelurahan baru kemudian diambil masing-masing 1 (satu) tempat pemungutan suara (TPS). Untuk mendapatkan jumlah sampel yang dikehendaki berdasarkan kepada kadar pulangan 40 peratus, maka jumlah soalselidik yang diedar kepada responden sebanyak 900 soalselidik. Untuk masing-masing daerah sampel diedarkan sebanyak 300 soalselidik.

E. 2. Teknik Pensampelan

Teknik pensampelan yang digunakan dalam kajian ini ialah rawak berstratifikasi yang melibatkan pemilih di masing-masing daerah tempat pemungutan suara. Kecamatan dan desa/kelurahan dipilih secara rawak termasuk para pemilih dimasing-masing tempat pemungutan suara. Untuk menunjukan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang dipilih dalam kajian ini sebagaimana tabel berikut ini :

¹³ Breen, R., "*Beliefs rationa choice and Bayesian Learning*," *Rationality and Society*, (11), 4 1999, hlm, 463-479

Tabel 2 : Daftar Lokasi dan Jumlah Kuisisioner Diedarkan Untuk Kabupaten Indragiri Hulu

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Kuisisioner	
				Dihantar	Diterima
1	Batang Cenaku	Talang Mulya	1	50	21
		Punti Anal	1	50	22
2	Kelayang	Bukit Selanjut	1	50	19
		Bongkal Madang	1	50	20
3	Rengat	Kampung Besar Kota	1	50	27
		Kampung Dagang	1	50	26
	Jumlah		6	300	135

Tabel 3 : Daftar Lokasi dan Jumlah Kuisisioner Diedarkan Untuk Kabupaten Siak Sri Indrapura

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Kuisisioner	
				Dihantar	Diterima
1	Dayun	Dayun	1	50	22
		Banjar Seminai	1	50	18
2	Sungai Apit	Sungai Apit	1	50	32
		Mengpapan	1	50	19
3	Tualang	Perawang	1	50	34
		Perawang Barat	1	50	23
	Jumlah		6	300	148

Tabel 4. : Daftar Lokasi dan Jumlah Kuisisioner Diedarkan Untuk Kota Dumai

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS	Soalselidik	
				Dihantar	Diterima
1	Dumai Timur	Bukit Batrem	1	50	31
		Bintan	1	50	27
2	Dumai Barat	Ratu Sina	1	50	26
		Laksamana	1	50	38
3	Bukit Kapur	Bukit Kayu Kapur	1	50	35
		Bukit Nenas	1	50	26
	Jumlah		6	300	183

E. 3. Tatacara Penyebaran Kuisisioner

Sebelum kajian dijalankan, pengkaji menetapkan tiga daerah sampel yang menurut pengkaji daerah ini memiliki perilaku pemilih di tiga daerah ini menarik untuk dikaji. Lalu pengkaji mencari data sekunder berkenaan dengan jumlah pemilih dimasing-masing daerah sampel kepada Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Riau, selepas itu pengkaji menentukan sampel kecamatan secara rawak. Setelah pensampelan kecamatan dilakukan berikutnya pengkaji menentukan Desa/Kelurahan secara rawak pula kemudian menentukan satu dari tiga tempat pemungutan suara dimasing-masing desa/kelurahan. Barulah kemudian pengkaji mengedarkan soalselidik kepada masing-masing pemilih setelah dilakukan rawak kepada daftar pemilih tetap di masing-masing tempat pemungutan suara yang ditetapkan sebagai sampel. Soalselidik diedarkan melalui ketua Rukun Tetangga dimana pemilih bertempat tinggal.

Tempoh empat minggu merupakan tempoh masa minimum mengedar dan mengumpul kembali soalselidik. Selepas empat minggu, pengkaji menghubungi ketua-ketua Rukun Tetangga untuk mengaturkan temujanji bagi mendapatkan kembali soalselidik.

E. 4. Unit Analisis

Unit analisis dalam kajian ini adalah para pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang dikeluarkan oleh pejabat Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Riau.

E. 5. Teknik Analisis.

Teknik analisis dalam kajian pertama melakukan Kategori dengan cara menjumlahkan skor pertanyaan, kemudian dicari panjang interval setiap

kelas dengan rumus sebagai berikut :
$$c = \frac{X_n - X_1}{k}$$

dimana :

c = panjang interval kelas

X_n = nilai terbesar

X_1 = nilai terkecil

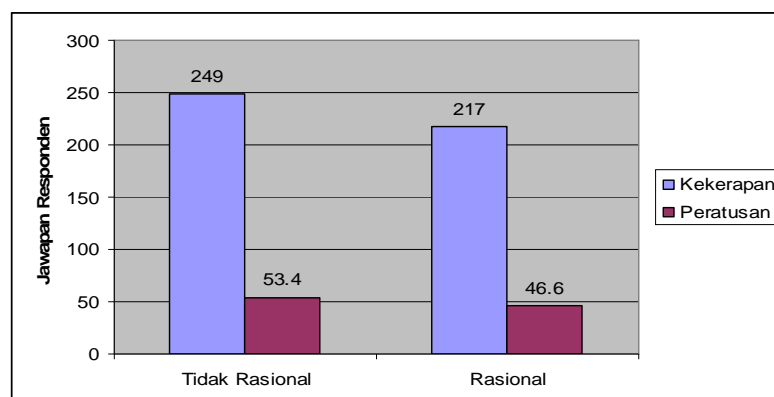
k = banyaknya kelas, dalam hal ini adalah 2 (Rasional dan Tidak Rasional)

kemudian masing-masing pertanyaan diberi skor tertinggi dan skor terendah sesuai dengan jumlah pertanyaan yang diajukan, baru selepas itu dilakukan analisis secara kuantitatif deskriptif, setelah memperoleh angka interval untuk menentukan rasional dan tidak rasional perilaku pemilih baru kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan teori yang digunakan dalam kajian ini, dan seterusnya disimpulkan sesuai dengan hasil kajian yang didapat.

F. Hasil Kajian

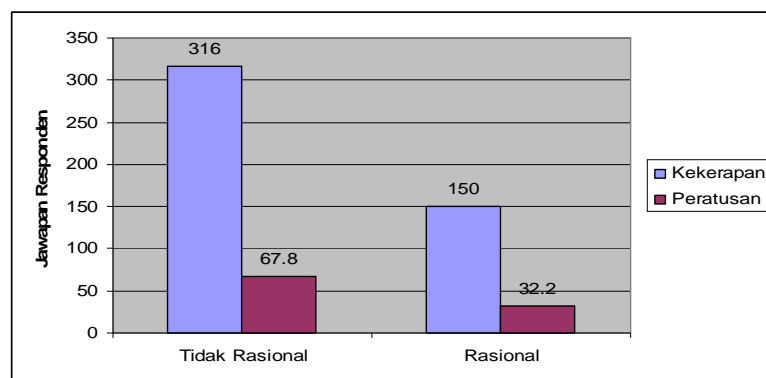
Tabel 5 : Perilaku pemilih Berorientasi Visi

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Rasional	249	53.4
Rasional	217	46.6
Total	466	100



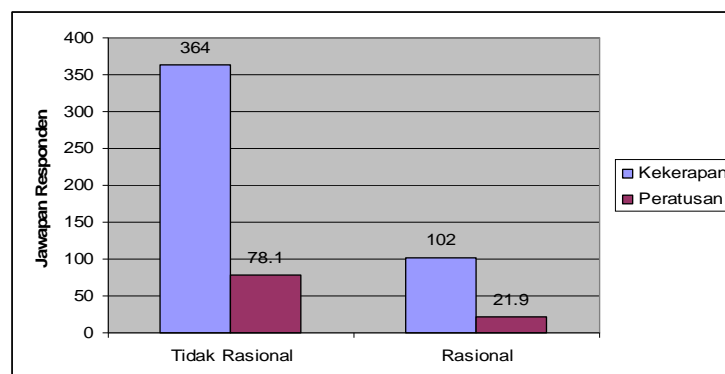
Tabel 6 : Perilaku pemilih Orientasi Misi

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Rasional	316	67.8
Rasional	150	32.2
Total	466	100



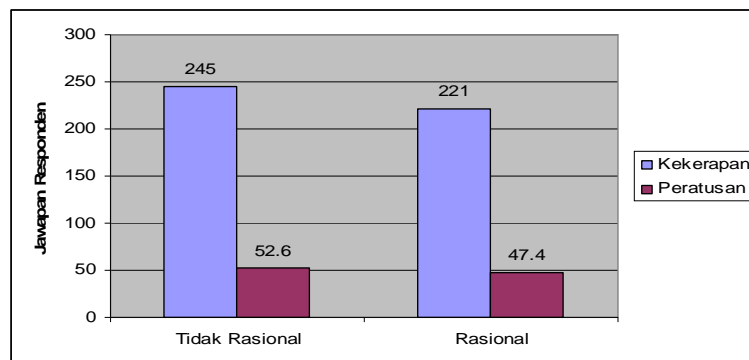
Tabel 7 : Perilaku pemilih Orientasi Program

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Rasional	364	78.1
Rasional	102	21.9
Total	466	100



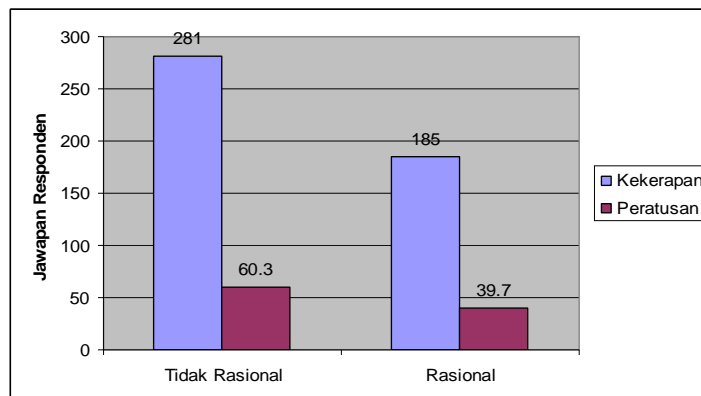
Tabel 8 : Perilaku pemilih Orientasi Kesamaan Sifat

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Rasional	245	52.6
Rasional	221	47.4
Total	466	100



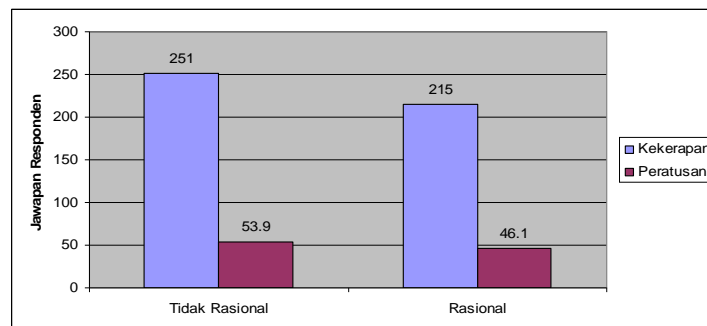
Tabel 9 : Perilaku pemilih Orientasi Karakter tokoh

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Rasional	281	60.3
Rasional	185	39.7
Total	466	100



Tabel 10 : Perilaku pemilih Orientasi Kedekatan hubungan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Tidak Rasional	251	53.9
Rasional	215	46.1
Total	466	100



G. Kesimpulan Kajian

Hasil analisis yang dilakukan untuk menentukan sifat yang dimiliki para pemilih dalam kajian ini tergolongkan kedalam sifat yang tidak rasional jika ditinjau dari teori barat. Dapatan kajian dilapangan membuktikan bahawa sifat dasar manusia yang melekat pada diri pemilih di tiga wilayah sampel maka termasuk dalam Kategori golongan rasional.

H. Daftar Pustaka

Djohaermansyah Djohan, 1990, *Problematik Pemerintahan dan Politik local*, Bumi Aksara, Jakarta.

Popper, K.R., "*Bernay's plea for a wider notion of rationality*," in Schilpp, P.A [ed.], 1974, *The Philosophy of Karl Popper*, open Court : La Salle.

Weber, M., 1978, *Economy and society : an outline of interpretative sociology*, Edited by Roth, G., & Mitter, C. Berkeley : University of California Press.

Ancok, J. (tanpa tahun), *Psikologi Politik*. Hand Out, [tidak diterbitkan], Yogyakarta, Fakultas Psikologi UGM.

Evans, J.St.B.T., & Over, D.E. 1996, "*Rationality in reasoning*", Hove, Sussex: Psychology Press.

Chater, N., Oaksford, M., Naksia, R., & Redington, M., 2003, "*Fast, frugal, and rational : how rational norms explain behavior*," Organisational Behavior and Human Decision Process.

Gigerenzer, G., & Goldstein, D., 1996, *Reasoning the fast and frugal way: models of bounded rationality*, "Psychological Review.

Lindenberg, S., 1985, "*An assessment of the new political economy : its potential for the social sciences and sociology in particular*," Sociological Theory.

Breen, R., 1999, "*Beliefs rational choice and Bayesian Learning*," Rationality and Society.